

**EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI
BIDANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Teknik Program Studi Teknik Sipil



Oleh :

Wildan Miftah Anugerah Susanto

1907786

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2023**

**EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI
BIDANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK**

Oleh

Wildan Miftah Anugerah Susanto

Sebuah Tugas Akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Program Studi Teknik Sipil

© Wildan Miftah Anugerah Susanto 2023

Universitas Pendidikan Indonesia

November 2023

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,

Dengan dicetak ulang, di fotokopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari peneliti.

**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

**EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI
BIDANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK**

WILDAN MIFTAH ANUGERAH SUSANTO

NIM. 1907786

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH PEMBIMBING:

Dosen Pembimbing I

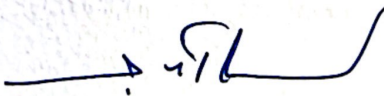


Dewi Yustiarini, S.T., M.T.

NIP. 19800802 200801 2 009

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Sipil



Dr. T. Ir. Juang Akbardin, S.T., M.T., IPM., Asean. Eng.

NIP. 19770307 200812 1 001

ABSTRAK

EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI BIDANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK

Wildan Miftah Anugerah Susanto
1907786

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan,
Universitas Pendidikan Indonesia. 2023.

Kemudahan memperoleh informasi di era digital semakin dirasakan masyarakat. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang salah satunya menghasilkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setiap Badan Publik ataupun Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten. Pemerintah terus mengembangkan inovasi SPSE agar diperoleh penyedia barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan dengan harapan menghasilkan kerja sesuai yang direncanakan. Namun itu, terkadang LPSE menyampaikan pengumuman tender dan non tender dengan identitas peserta yang dirahasiakan, memberikan informasi proses pengadaan secara rinci termasuk tidak dapat diketahui penyedia jasa/barang yang menjadi pemenang, memberikan informasi yang terbatas, tidak dapat diakses secara mudah dan tidak lengkap dikarenakan untuk bergabung (*Login*) membutuhkan ID dan *password* untuk mengakses informasi secara rinci. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh *Multistakeholder* terkait kebutuhan infrastruktur publik, dan mengukur kualitas penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan Instrument Standar Data Infrastruktur CoST (*Construction Sector Transparency*) dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyebutkan: 1) Informasi yang dibutuhkan oleh *multistakeholder* terkait transparansi infrastruktur publik mengacu pada instrument CoST IDS dan LPSE yakni berkaitan dengan identitas proyek, persiapan proyek, penyelesaian proyek, proses pengadaan proyek, serta implementasi proyek, 2) Kualitas penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument Standar Data Infrastruktur: a) CoST (*Construction Sector Transparency*). Diukur dengan 40 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 64%, yaitu berada pada interval 60.00% - 69.00% (kategori sedang). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur, dan b) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Diukur dengan 27 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 72%. yaitu berada pada interval 70.00% - 79.00%. (kategori baik). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur.

Kata kunci: Transparansi, Infrastruktur-publik, Pengadaan-Barang-Jasa.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION DISCLOSURE PUBLIC INFRASTRUCTURE PROVISION FIELD

Wildan Miftah Anugerah Susanto

1907786

Civil Engineering Study Program, Faculty of Technology and Vocational
Education, Indonesian Education University. 2023.

The public is increasingly feeling the ease of obtaining information in the digital era. With the rise of infrastructure development by the Government, the role of the community as supervisors of development needs to be increased to reduce criminal acts of corruption. Corruption can be reduced if the principle of transparency is implemented. The aim of this research is to determine the information needed by Multistakeholders regarding public infrastructure needs, and to measure the quality of providing infrastructure information as an embodiment of the principle of transparency in the construction services sector using the CoST (Construction Sector Transparency) and LPSE (Electronic Procurement Services) Infrastructure Data Standard Instruments. The type of research is qualitative research with a case study method. The results of the research state: 1) The information needed by multi-stakeholders regarding public infrastructure transparency refers to the CoST IDS and LPSE instruments, namely related to project identity, project preparation, project completion, project procurement process, and project implementation, 2) The quality of providing infrastructure information as an embodiment principles of transparency in the construction services sector in Greater Bandung with Infrastructure Data Standard Instruments: a) CoST (Construction Sector Transparency). Measured with 40 questions, an average figure of 64% was obtained, which is in the interval 60.00% - 69.00% (medium category). This indicates that public information providers are available at all times regarding infrastructure information, and b) LPSE (Electronic Procurement Services). Measured with 27 questions, an average figure of 72% was obtained. namely in the interval 70.00% - 79.00%. (good category). This indicates that public information providers are available at all times regarding infrastructure information.

Keywords: Transparency, Public Infrastructure, Procurement of Goods and Services.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
BAB I	11
PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Batasan Masalah.....	16
1.4 Rumusan Masalah	17
1.5 Tujuan Penelitian.....	17
1.6 Manfaat Penelitian.....	17
1.7 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	19
KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Transparansi	19
2.1.1 Definisi Transparansi	19
2.1.2 Dimensi transparansi	22
2.1.3 Indikator Transparansi	24
2.2 Landasan Hukum Transparansi Penyediaan Informasi Publik.....	30
2.2.1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.....	30
2.2.2 Pengadaan	33
2.3 CoST-IDS	37
2.3.1 Sejarah CoST-IDS di Indonesia.....	37
2.3.2 Teori 4 Elemen Pendekatan CoST-IDS	38
2.4 Pengungkapan Data Berdasarkan UU KIP, PBJ dan CoST-IDS	42

2.5	Infrastruktur Publik	42
2.6	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	44
BAB III.....		46
METODOLOGI PENELITIAN		46
3.1	Lokasi Penelitian	46
3.2	Waktu Penelitian	46
3.3	Desain Penelitian	47
3.4	Instrumen Penelitian.....	48
3.5	Objek Penelitian	51
3.6	Tahapan Penelitian	52
3.7	Analisa Data	55
3.8	Diagram Alir.....	57
3.9	Kerangka Berfikir.....	58
BAB IV		59
TEMUAN DAN PEMBAHASAN		59
4.1	Temuan Penelitian	59
4.1.1	Informasi Yang Dibutuhkan Oleh <i>Multistakeholder</i> Terkait Transparansi Infrastruktur Publik	59
4.1.2	Analisis Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi	60
4.2	Pembahasan	66
4.2.1	Informasi Yang Dibutuhkan Oleh <i>Multistakeholder</i> Terkait Transparansi Infrastruktur Publik	66
4.2.1	Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi	67
4.2.1.2	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).....	90
BAB V.....		110
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI		110
5.1	Simpulan.....	110
5.2	Implikasi.....	110
5.3	Rekomendasi	111
DAFTAR PUSTAKA		112
LAMPIRAN.....		117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	46
Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian	57
Gambar 3.4 Kerangka Berfikir.....	58
Gambar 4.1 Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi dengan Instrument CoST-IDS (Construction Sector Transparency - Infrastructure Data Standard).....	90
Gambar 4.2 Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi dengan Instrument LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dimensi Transparansi	24
Tabel 2.2 Indikator Transparansi	28
Tabel 2.3 Data Informasi Pengungkapan Data LPSE	36
Tabel 2.4 Data Informasi Pengungkapan Data CoST-IDS	41
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	46
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	48
Tabel 3.3 Interpretasi Persentase.....	51
Tabel 4.1 <i>Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument CoST-IDS (Construction Sector Transparency - Infrastructure Data Standard).</i>	61
Tabel 4.2 <i>Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).</i>	64

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. (2017): *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Alfian Malik, (2010). *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Yogyakarta: Cv Andi Offset
- Andi Rokhmat and others, ‘Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Jalan Provinsi, Air Bersih, Hotel, Penginapan Dan Restoran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto’, *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13.2 (2020), 70 <<https://doi.org/10.26623/jreb.v13i2.2598>>.
- Arhin, S. G., Banadda, N., Komakech, A. J., Kabenge, I., & Wanyama, J. (2016). Membrane Fouling Control In Low Pressure Membranes: A Review On Pretreatment Techniques For Fouling Abatement. "Environmental Engineering Research", Vol. 21, No.2, hal. 109-120.
- Arifin Salahuddin Rijal dan Wisudanto. (2017): *Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur*. Prosiding Simposium II – UNIID 2017.
- Aslur, Saudi Sau’ud dan Tukiman. (2023): *Implementasi Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula)*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1.2023
- Barry, Render dan Jay Heizer. (2001). *Prinsip-prinsip Manajemen Operasi: Operations Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dawud, M, Namara, I, Chayati, N, Li, F.M., 2016, Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota Tangerang Berbasis Masyarakat, Bogor, Seminar Nasional Sains dan Teknologi.Teknik Sipil Ibnu Khaidun.
- Edowai, Mikael., Herminawaty Abubakar dan Miah Said. (2021): *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan : Penerbit Pusaka Almaida
- Ervianto, W.I., (2005), *Manajemen Proyek Konstruksi*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ervianto, W.I. (2015). *Inplementasi Green Construction Sebagai Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, hlm.2-3. Makalah Konferensi Nasional Forum Wahana Teknik ke-2.

- Gunawan, Dimas Rizky. (2016): *Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)*. AKRUAL: Jurnal Akuntansi Vol. 8 (1) (2016): 72-102.
- Hardjowijono B. dan Muhammad H. (2009): *Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Indonesian Procurement Watch.
- Husen, Abrar, (2010). *Manajemen Proyek*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- I Putu Ari Sanjaya, Perkembangan Infrastruktur di Indonesia, 17 Oktober 2018, 1-19. <<https://www.kompasiana.com/sigit93459/5bc6196f12ae9444417a8af4perkembangan-infrastruktur-komunikasi-global?page=all>>
- Ibbs, W. (1997), "Quantitative Impacts of Change on Project Cost & Schedule". *Journal of Construction Engineering and Management*, Vol. 123, No. 3, 8–011.
- Iman Soeharto. (1999). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)* Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Inkiriwang, R. L. dan Febrina P. Y. Sumanti. (2017): *Aplikasi Prinsip Eco-Design Pada Tahap Inisiasi Proyek Infrastruktur Publik Di Provinsi Sulawesi Utara: Keniscayaan Atau Kemustahilan*. TEKNO Vol.15/No.68/December 2017.
- Jaydeep, N. D., Pitroda, J. & Bhavsar, J. J. (2015). A Review on Change Order And Assessingcauses Affecting Change Order in Construction. *Journal of International Academic Research for Multidisciplinary Impact Factor*, Vol. 2, No.12, 152–162.
- Kurniadi, Ahmad Taufik, Hamrun. (2014): *Transparansi Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*. OTORITAS Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. IV No. 2 Oktober 2014.
- Krina, Loina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Krvinsh, Anatoly dan Andrejs Vilks. (2013). *Prevention Of Corruption In Publik Procurement: Importance Of General Legal Principles*. Jurisprudencija/ Jurisprudence. Mykolo Romerio Universitetas, 2013.

- Mahmudi. (2016): *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moreno-Albarracín, Antonio Luis, *et. al.* (2012): *Transparency Indicators To Improve Accountability For Non-Profit Organizations: A Spanish Case Study*. echnological and Economic Development of Economy. 2021 Volume 27 Issue 3: 763–782.
- Muslimin, Ikhwan (2023). *Papan Informasi Proyek Infrastruktur Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bontang*. Jurnal Riset Pembangunan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023.
- Ndihokubwayo, R. and Haupt, T. (2009), “*Variation Orders on Construction Projects: Value Adding or Waste*”, *International Journal of Construction Project Management*, Vol. 1, No. 2, 1–17.
- Neupane, Arjun. (2014): *The Potential Of Publik E-Procurement Technology To Reduce Corruption In Publik Procurement*. Australia : School of Management and Enterprise Faculty of Business, Education, Law and Arts University of Southern Queensland Toowoomba, Queensland.
- Nunnally, S.W. 1998. *Construction Methods and Management* 4th Edition. New Jersey : Prentice Hall.
- Perkins, Peter, Johann Fedderke And John Luiz. (2005): *An Analysis Of Economic Infrastructure Investment In South Africa*. *South African Journal of Economics* Vol. 73:2 June 2005
- Persada, Citra. (2015): *Model Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (Studi Kasus: Kota Bandarlampung)* Ringkasan Disertasi. Bogor, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Priyono, Edi dan Fereshti Nurdiana Dihan. (2010): *E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas*. Seminar Nasional Informatika 2010 (semnasIF 2010). UPN Veteran Yogyakarta, 22 Mei 2010.
- Purwanti, Umi. (2021): *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*. Volume 3 Nomor 2 Edisi Maret 2021.

- Ralp S. Polimeni, Frank J.Fabozzi & Arthur H.Adelberg.1988.*Akuntansi Biaya Konsep dan aplikasi untuk pengambilan keputusan manajerial* Jilid 2 Edisi Kedua.Jakarta:Erlangga.
- Retnowati, Endang. (2012): *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*. PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Teguh, Rizani., Sudiadi. (2015). *Manajemen Konstruksi*. Palembang : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika GI MDP
- The World Bank. 1994. “*World Development Report: Infrastructure for Development*”. Oxford University Press, New York.
- Sandi, P V., M A Rohman and C Utomo. *A Concept To Evaluate Procurement Principles Implementation Of Publik Construction Project In Surabaya*. 4th International Conference on Civil Engineering Research (ICCER 2020). IOP Publishing.
- Sandy G.A., Sompie, B. F. dan Rantung, J.P. (2012), “Analisis Faktor-faktor Penyebab *Change Order* dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Waktu Pelaksanaan Proyek konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Ilmiah Media Engineering* Vol. 2, No. 4.
- Shihab, Habib Muhammad. *et. al.* (2022): *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se Indonesia*. JURNAL TRANSFORMATIVE Vol. 8 No. 1 Tahun 2021 DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5
- Somasundaram, Ramanathan. (2018): *Regional: Development of a Global e-Government Procurement Architecture using Blockchain Technology*. ADB : Technical Assistance Consultant’s Report.
- Suriani dan Cut Nanda Keusuma. (2015): *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, Hal 1 -18.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparyanto & Rosad. (2015). *Manajemen Pemasaran*, In Media, Yogyakarta.

- Umi Narimawati. 2010. *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. Jakarta : Genesis.
- Wayne Parsons. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Welly, et. al. (2021): *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali*. Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 6, No 1, November 2021, Hal 157 – 167.
- Yulyani, Yeyet (2022) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Barang Dan Jasa (Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2020)*. Sarjana Skirpsi, Universitas Siliwangi.
- Yustiarini, Dewi, dkk (2023). *Analisis Keterbukaan Informasi Publik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik bidang Penyediaan Infrastruktur*. Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil 2023.